

## DAFTAR PUSTAKA

### A.Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004.
- Admosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1998.
- Apeldoorn, L.J van dalam Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT Revika Aditama. Bandung, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2014.
- , *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik*. PT Raja Grafindo Persada. Depok, 2020.
- Azra, Azumardi, *Demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Kencana, Jakarta 2010
- Cunningham, Frank, *Theories Of Democracy*, Routledge, London, 2002
- Faiz, Pan Mohamad, Irfan Nur Rachman, Anna Triningsih, Helmi Kasim, M. Reza Winata, *Menegakkan Keadilan Pemilu, menjaga kemurnian suara rakyat, dinamika penyelesaian sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, November 2021
- Gaffar, M Janedjri., *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, November 2013
- Hady, Nuruddin, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, Setara press, Malang, 2016
- Harman, Benny K, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi sejarah pemikiran pengujian UU terhadap UUD*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2013
- He, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Depok, September 2018.
- HS, Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis*, Rajawali Pers, Depok, 2018

Huda, Ni'Matul. *Perkembangan Hukum Tata Negara perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*. FH UII Press. Yogyakarta, 2014

Institusi Demokrasi dan Asistensi Demokrasi, *Desain penyelenggaraan pemilu; Buku pedoman Internasional IDEA (diterjemahkan oleh Djohan Radi)*, 2016

Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Mirar Buana Media. Yogyakarta, 2021.

Isra, Saldi, *Lembaga Negara (Konsep, sejarah, wewenang dan dinamika konstitusional)*, Rajawali Pers, Depok, 2021

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencanan Prenada Media Grup. Jakarta, 2008.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung, 2008.

Perwira, Indra, Mei Susanto, *Hukum Hak Asasi dan Demokrasi*, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2019

Salman, A. Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, Fajar Media, Bandung, 2013

Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press. Yogyakarta, 2011

Soekanto, soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2011

Solihin, Firdaus -Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Sinar Grafika. Jakarta, 2016

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta. Bandung, 2015

Tim penyusun hukum acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta Pusat, Agustus 2010

## **B. Jurnal**

A.Mukhtie Fadjar.(2009). *Pemilu yang Demokratis dan berkualitas, penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*, Jurnal Konstitusi, Vol 6 No.1, April , <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Ejurnal&I>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2023, pukul 10.20 WIB

- Adinda Thalia. (2023), *Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pilkada secara permanen sesuai putusan mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU-XX-2022 dan implikasinya terhadap kepastian hukum*, Jurnal FH Universitas Mataram, hal.88, <http://eprints.unram.ac.id/38585>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 19.00 WIB
- Amanda Dea Lestari, Bustanuddin. (2021). *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi: memahami fenomena penemuan hukum (Rechtvinding) yang progresif*, Limbago Journal Of Constitutional Law, Vol 1 No 1, hal. 5. <http://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/8635>, diakses pada tanggal 15 september, pukul 08.20 WIB
- Aris, M. S. (2022). *Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional*. Media Iuris, 473-506. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34154> diakses tanggal 3 Oktober 2023, pukul 21.00 WIB
- Baharudin Riqiey, (2023), *Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan sengketa pemilu*, Jurnal APHTN HAN, FH Universitas 17 Agustus 2023, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>, diakses tanggal 22 Agustus 2023, pukul 21.30 WIB
- Geofani Milthree Saragih, (2022) *,Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022*, Juenal hukum caraka justitia, <https://garuda.kemendikbud.go.id/journal/view/30647>, diakses tanggal 3 Agustus 2023, Pukul 22.30 WIB
- Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023) *,SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM DI NEGARA HUKUM DEMOKRASI*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram ( *STUDI*. 38(2), 241-254. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/527/309>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, pukul 15.15 WIB
- H.M Laica Marzuki, (2016), *Konstitusi dan konstitusionalisme*, Jurnal konstitusi, hal. 7,001.<https://doi.org/10.31078/jk741>, diakses tanggal 25 Agustus 2023, pukul 18.00 WIB
- Ika Kurniawati dan Lusy Liany, (2019), *kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative legislator dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal hukum 10, No. 1 <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023, pukul 20.15 WIB
- Iza Rumesten RS, (2016), *Dilema dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan memutus sengketa Pilkada*, Jurnal

Konstitusi. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1145>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023, pukul 17.30 WIB

Johansyah, J, (2019), Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945. *Solusi*, 17(2) hal. 94–105. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.167>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2023, Pukul 13.50 WIB

Maria S.W. Sumardjono, “*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*,”Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta,6 Agustus 1997, hal. 1, dalam <https://ejournal.unsra.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/25885/25527>,

Ni'matul Huda, *Pengujian perppu oleh Mahkamah Konstitusi*, No 4, hal.73:91, <https://doi.org/10.31078/jk754>, diakses tanggal 28 Agustus 2023, pukul 11.00 WIB

Noorwahidah, N. (2016). *Sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat (Analisis Terhadap Putusan MK No. 45/PHPU.D VIII/2010 dari Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam)*. Jurnal Konstitusi, 8(1), 23 <https://doi.org/10.31078/jk812>. Diakses pada tanggal 11 oktober 2023, pukul 21.40 WIB

Rajab, A. M., Andriyan, Y., Muhamad, S., & Supardi, E, (2023), *Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada*. Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Administrasi Publik 3 (1), 36,51, <https://unimuda.ejournal.id/jipunimuda/article/4731/1624>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB

Rozi, S., & Heriwanto, H. (2019). Demokrasi Barat: Problem Dan Implementasi Di Dunia. *Jurnal Al-Aqidah*, 11 (2) hal. 189–207. <https://doi.org/10.15548/ja.v11i2.1422>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 22.11 WIB

Silalahi, W. (2022), *Kesiapan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 4(2). hal. 171–185, <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.208>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023 Pukul 14.48 WIB

Supriyadi dan Amiruddin Kasim, (2020), *Desain Badan peradilan khusus pemilihan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*. Jurnal Konstitusi, 17, No. 3 <https://doi.org/10.31078/jk17310>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, Pukul 07.30 WIB

Tanto Lailam, (2016). *Pro-kontra kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang yang mengatur Eksistensinya*, Jurnal Konstitusi, 12 (4), Jakarta,<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1247>, Diakses pada tanggal 14 oktober 2023, pukul 17.23 WIB

Tatawu, G, (2018), *Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. Halu Oleo Law Review, 1(2) hal.144. <https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3639>, Diakses pada tanggal 14 Oktober 2023, Pukul 15.43 WIB

### C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

\_\_\_\_\_,Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109 ).

\_\_\_\_\_,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang

\_\_\_\_\_,Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721 )

\_\_\_\_\_,Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

#### **D. Skripsi**

Ferdy Nurdiansyah, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah*, skripsi universitas sunan gunung djati, 2020, hal. 1-23, diakses tanggal 3 Agustus 2023, Pukul 22.00 WIB

#### **E. Internet/Website**

<https://ham.go.id/produk-hukum/putusan-mk>. Akses 28 Agustus 2023, Pukul 19.00 WIB

[https://jdih.go.id/files/99/perbawaslu\\_2014\\_1\\_perbawaslu\\_no\\_8\\_2014.pdf](https://jdih.go.id/files/99/perbawaslu_2014_1_perbawaslu_no_8_2014.pdf). Akses 28 Agustus 2023, Pukul 20.30 WIB